

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Banten termasuk sebagian dari wilayah setingkat provinsi di Indonesia yang memiliki posisi strategis pada ujung barat Pulau Jawa. Berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Sunda di barat, serta berbatasan dengan Jawa Barat serta dengan Jakarta di timur, Banten menjadi penghubung penting rentang Pulau Jawa dan Pulau Sumatera melintasi Pelabuhan Merak. Banten meliputi delapan kabupaten/kota, yakni Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang, juga Kota Tangerang Selatan. Secara geografis, Banten memiliki keanekaragaman potensi kekayaan alamnya mencakup bidang pertanian, perikanan, perkebunan, dan pariwisata dengan besaran area sekitar 9.662,92 km² (BPS Banten, 2022).

Kawasan seperti Pandeglang dan Lebak masih didominasi oleh kegiatan agraris, sementara kota-kota seperti Cilegon dikenal sebagai pusat industri berat, terutama di sektor petrokimia dan baja, sehingga faktor tersebut akan mempengaruhi meningkatnya arus urbanisasi. Banten menjadi tujuan bagi para perantau karena kedekatannya dengan ibu kota dan dianggap memiliki potensi yang strategis untuk mencari lapangan pekerjaan. Namun, Keterbatasan jumlah sektor pekerjaan yang tersedia belum bisa memuat individu yang membutuhkan pekerjaan, sehingga menambah jumlah pengangguran di provinsi ini (Amaya, 2024).

Berdasarkan data pada tahun 2022 oleh Badan Pusat Statistik selanjutnya disingkat BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka selanjutnya disebut dengan TPT di Banten pada Agustus 2023 menembus 7,52%, dengan jumlah pengangguran sekitar 424,69 ribu orang. Peningkatan angka pengangguran tersebut memperlihatkan terdapat ketidaksesuaian terkait permintaan keterampilan yang dimiliki oleh Angkatan kerja dan tenaga kerja di Banten. Selain itu, pertumbuhan populasi yang cukup tinggi juga memberikan tekanan tambahan pada pasar kerja. Situasi ini memerlukan kebijakan strategis dari pemerintah daerah, misalnya melalui penyempurnaan mutu pendidikan serta program pelatihan tenaga kerja, serta dengan mendorong penanaman modal pada berbagai sektor yang menyerap banyak tenaga kerja, juga memperluas akses terhadap informasi dan peluang kerja (Muzakki, 2024).

Tingginya angka pengangguran ini menggambarkan terjadi ketidakcocokan antara kebutuhan pasar sumber daya manusia dengan kualifikasi tenaga kerja yang ada, sehingga menjadi perhatian utama dalam konteks pembangunan ekonomi dan sosial. Kondisi ini memiliki dampak yang luas, mulai dari peningkatan beban ekonomi masyarakat hingga hambatan dalam pembangunan wilayah secara keseluruhan (Ainaya, 2025).

Berdasar laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten, ketimpangan pendapatan di provinsi ini menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, dengan kelompok kecil penduduk mengendalikan porsi terbesar dari sumber daya ekonomi, sedangkan mayoritas warga masyarakat lainnya harus berjuang untuk bertahan hidup (BPS Banten, 2024). Ketimpangan ini menciptakan ketidakadilan struktural yang mempengaruhi beragam bidang

kehidupan, misalnya akses pada pendidikan, layanan kesehatan, juga peluang kerja yang layak. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat memicu ketidakstabilan sosial yang lebih besar dan menghambat upaya pembangunan berkelanjutan di Banten (Marthalina, 2018).

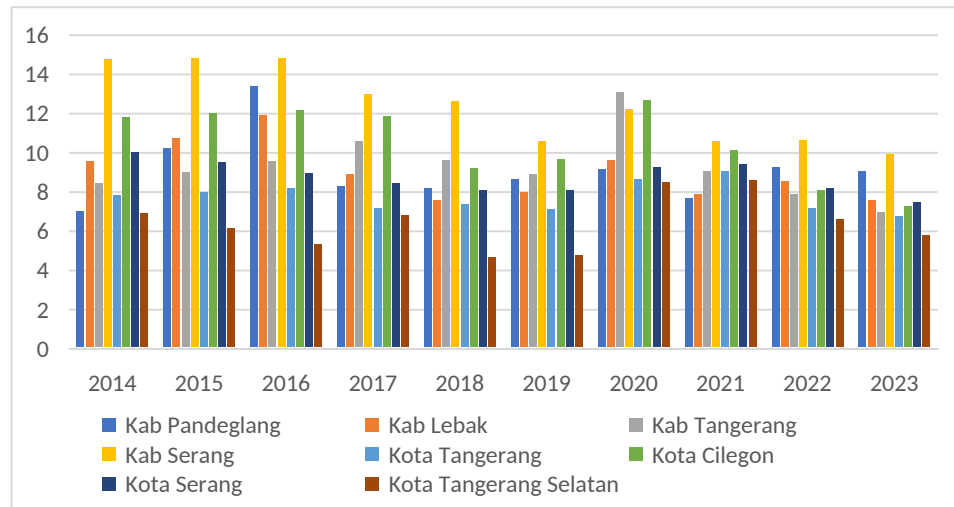
Tabel 1.1 Peringkat Tingkat Pengangguran Tertinggi Di Enam Provinsi

PROVINSI	PERSEN (%)
Banten	7,52
Jawa Barat	7,44
Kep. Riau	6,80
DKI Jakarta	6,53
Maluku	6,31
Sulawesi Utara	6,10

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Banten menempati jumlah angka pengangguran relatif tinggi mencapai yaitu 7,52% pada agustus 2023 dibandingkan dengan provinsi lain. Situasi ini menggambarkan bahwa walaupun Banten mempunyai potensi skala ekonomi luas dengan berbagai sektor industri, namun penyerapan tenaga kerja masih belum optimal. Perbedaan tingkat pengangguran antarprovinsi juga mengindikasikan adanya kesenjangan dalam kualitas sumber daya manusia, struktur ekonomi daerah, serta efektivitas kebijakan ketenagakerjaan di masing-masing wilayah.

Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Banten 2014-2023 (Persen %)



Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

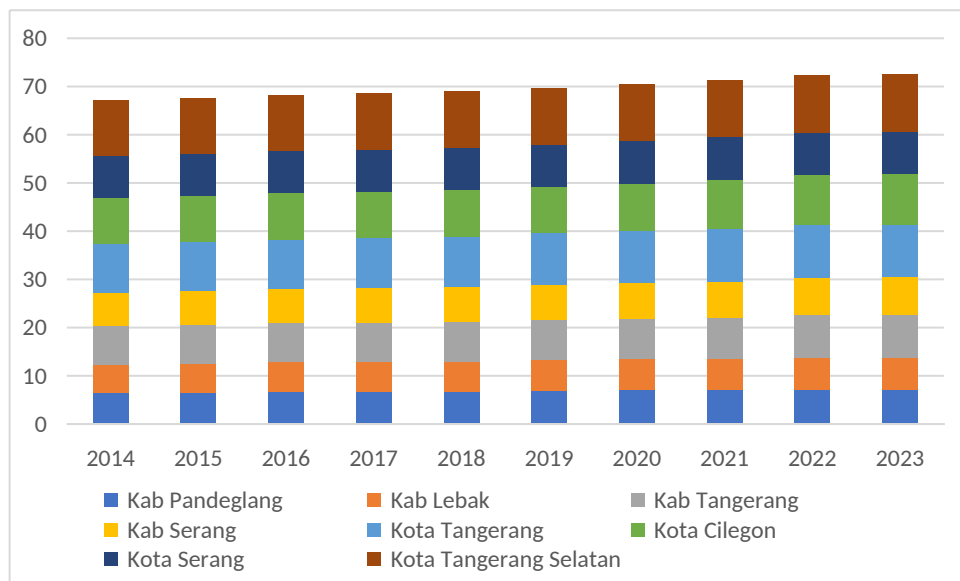
Mengacu pada grafik tersebut, tingginya pengangguran di Provinsi Banten menunjukkan fluktuasi angka pengangguran selama periode 2014 hingga 2023, menjadikannya sebagai salah satu isu krusial yang perlu diperhatikan. Fluktuasi angka pengangguran bukan hanya berdampak pada situasi perekonomian daerah, bahkan turut berdampak pada aspek kemasyarakatan. Ketidakstabilan dalam lapangan kerja dapat menyebabkan peningkatan kemiskinan, ketidakpuasan sosial, dan berkurangnya kualitas hidup. Selain itu, masalah pengangguran yang berkepanjangan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan tantangan bagi pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rianda, 2020).

Data tersebut memiliki peran penting dalam memahami dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh pengangguran. Tingginya pengangguran bukan sekedar menghalangi laju pertumbuhan ekonomi, serta turut memperburuk kondisi kemiskinan juga memperlebar kesenjangan sosial di masyarakat. Keterbatasan peluang kerja dan tekanan ekonomi yang dialami individu yang

menganggur dapat memicu munculnya permasalahan sosial seperti menurunnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Mervita, 2022).

Berbagai macam aspek juga menentukan tingginya TPT di Banten, salah satunya dalam bidang pendidikan. Pendidikan memiliki peran yang signifikan dalam mempersiapkan individu untuk memasuki pasar kerja. Namun, di Banten, terdapat kesenjangan besar antara pendidikan masyarakat selaras dengan permintaan sektor ketenagakerjaan. Sebagian besar tenaga kerja yang menganggur di provinsi ini didominasi oleh individu yang kurang memiliki keterampilan spesifik sesuai tuntutan industri modern yang dibutuhkan (Yuniar, 2022).

Gambar 1.2 Tingkat Pendidikan Provinsi Banten 2014-2023 (Tahun)



Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Tingkat pendidikan yang rendah berkontribusi pada Minimnya kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Di Banten, bidang-bidang utama seperti manufaktur, perdagangan, serta layanan jasa sering kali mencari tenaga

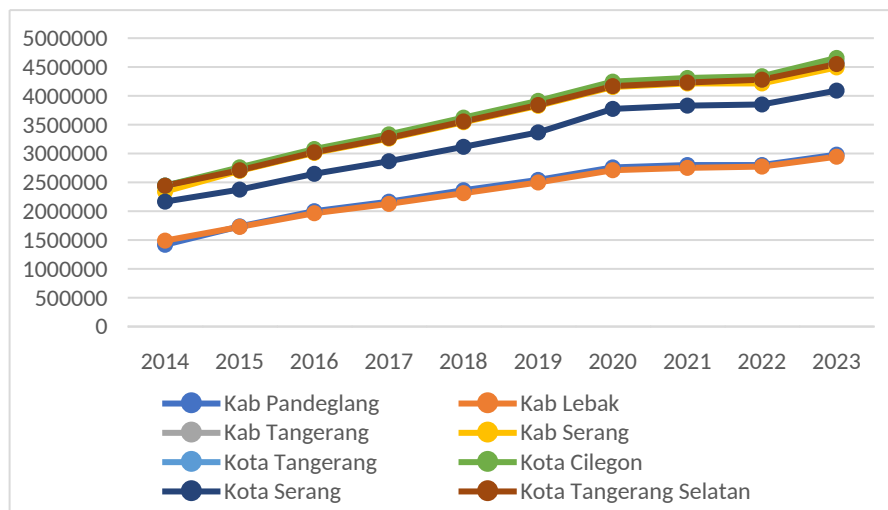
kerja yang memiliki keahlian teknis atau profesional. Ini menunjukkan bahwa hanya memiliki pendidikan dasar tidak lagi memadai untuk memastikan seseorang mendapatkan pekerjaan, terutama di tengah persaingan tenaga kerja yang semakin intens (Umam, 2018). Dalam mengatasi masalah ini, upaya dalam meningkatkan mutu serta memperluas akses pendidikan menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Pendidikan vokasional yang berfokus pada standar dan kualifikasi pasar kerja yang dibutuhkan di sekitar dapat menjadi solusi untuk menjembatani kesenjangan terkait keinginan pasar kerja dan kualifikasi tenaga kerja (Filiasari, 2021).

Berbekal kualifikasi pengajaran dengan standar tinggi, individu mempunyai kemampuan guna menegosiasikan kompensasi yang lebih layak juga kondisi kerja yang lebih memadai, lantaran mereka cenderung mempunyai keterampilan, pengetahuan, dan daya tawar yang lebih tinggi. Sebaliknya, bagi individu yang memiliki tingkat pendidikan lebih rendah sering kali menghadapi kerentanan lebih besar terhadap eksploitasi di dunia kerja. Akibatnya, mereka cenderung menolak pekerjaan yang dianggap tidak layak atau tidak memberikan kompensasi yang sepadan, yang pada akhirnya dapat mendorong mereka ke dalam pengangguran (Muthoharoh, 2023).

Dalam konteks ini, hubungan antara upah minimum serta jenjang pengangguran terbuka di Provinsi Banten menunjukkan perubahan dalam pasar tenaga kerja yang dipicu oleh kebijakan ekonomi daerah. Penerapan upah minimum ditujukan sebagai bentuk perlindungan bagi para pekerja dari eksploitasi serta meningkatkan taraf hidup mereka. Namun, dampak kebijakan ini terhadap tingkat pengangguran sangat bergantung pada berbagai faktor,

seperti struktur ekonomi wilayah, kualitas pendidikan masyarakat, serta kemampuan pasar tenaga kerja untuk beradaptasi dengan perubahan kebijakan tersebut (Abdi, 2024). Jika struktur ekonomi suatu daerah mayoritas meliputi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang memiliki keterbatasan dalam kemampuan membayar upah minimum, penerapan kebijakan tersebut dapat menimbulkan tekanan bagi pelaku usaha. Kenaikan biaya produksi akibat peningkatan upah sering kali membuat UKM terpaksa mengurangi jumlah tenaga kerja, membatasi perekrutan baru, atau bahkan menghentikan operasionalnya, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Namun, sebaliknya, di wilayah dengan struktur ekonomi yang lebih kuat dan didukung oleh tenaga kerja berpendidikan serta berkeahlian tinggi, penerapan kebijakan upah minimum justru dapat menjadi instrumen efektif dalam mempertahankan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan stabilitas ekonomi (Aprian, 2019).

Gambar 1.3 Upah Minimum Provinsi Banten 2014-2023 (Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik

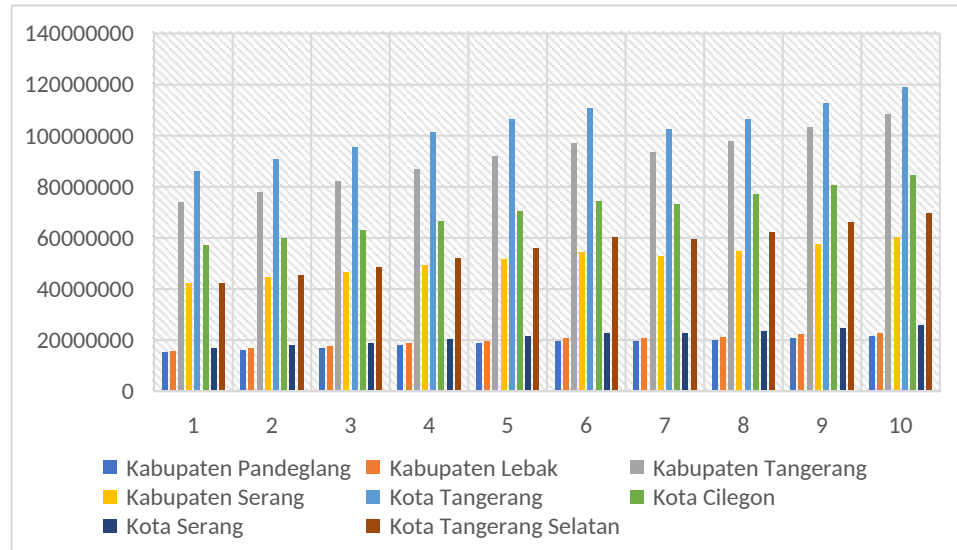
Selama periode 2014–2023, UMP Banten menunjukkan dalam tren peningkatan yang konsisten, dari Rp1.325.000 pada tahun 2014 menjadi Rp2.661.280 pada tahun 2023. Kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi, selanjutnya disebut UMP ini bertujuan guna mengoptimalkan kemakmuran pekerja melalui pemberian pendapatan minimum yang lebih layak. Namun, dampaknya bagi tingkat pengangguran terbuka sangat bergantung pada struktur ekonomi daerah, kemampuan sektor usaha untuk memenuhi kenaikan biaya tenaga kerja, dan kualitas pendidikan serta keterampilan pekerja (Tangke, 2023).

Teori Kaufman dan Hotchkiss mengemukakan adanya keterkaitan antara tingkat upah dan jumlah pengangguran. Saat pemerintah menetapkan upah yang terlalu tinggi, besaran pekerja yang terserap cenderung menurun. Di sisi lain, bila upah minimum di suatu daerah ditetapkan terlalu rendah, kondisi tersebut justru dapat memicu meningkatnya angka pengangguran. Dari perspektif pengusaha, kenaikan upah berarti meningkatnya biaya operasional, sehingga untuk menekan pengeluaran mereka sering memilih mengurangi jumlah pekerja. Kebijakan tersebut pada akhirnya dapat mendorong naiknya tingkat pengangguran. Dengan demikian, meskipun kenaikan upah membawa keuntungan bagi pekerja, hal tersebut dapat menjadi beban bagi pengusaha (Aulia, 2024).

Maka dari itu, penting untuk menciptakan keseimbangan antara penambahan upah minimum dan Angkatan kerja. Langkah seperti pelatihan kerja yang selaras dengan kebutuhan industri, pengembangan pendidikan vokasional, juga insentif bagi bisnis kecil untuk tetap mempekerjakan tenaga

kerja meskipun ada kenaikan UMP dapat membantu mengurangi pengangguran (Rahmi, 2022).

Gambar 1.4 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Banten 2014-2023 (Juta Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Di sisi lain, Produk Domestik Regional Bruto selanjutnya disebut PDRB di wilayah Provinsi Banten menunjukkan tren kenaikan. PDRB berfungsi guna memperhatikan perkembangan perekonomian di sebuah wilayah, baik berdasarkan harga saat ini maupun harga tetap. Menurut Amrullah, dkk (2019), meningkatnya PDRB menandakan adanya pertumbuhan volume barang dan jasa, yang kemudian mendorong peningkatan kebutuhan terhadap faktor-faktor produksi, termasuk kebutuhan pekerja, sebab itu berpotensi menyusutkan angka pengangguran. (Filiyasi, 2021).

Angka pengangguran di Provinsi Banten cenderung tinggi, dan kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab. Pertama, jenis pertumbuhan yang muncul lebih sering terkonsentrasi di bidang usaha yang kapital intensif daripada padat karya. Di Banten, kawasan industri di wilayah seperti Cikande

dan Serang berfokus pada teknologi tinggi yang membutuhkan tenaga kerja terampil, sementara mayoritas tenaga kerja lokal belum memiliki kualifikasi yang sesuai. Kedua, kesenjangan pendidikan juga menjadi penyebab utama, yang mana banyak pelamar kerja belum memiliki keterampilan teknis yang diperlukan guna memasuki pasar kerja modern (Muzakki, 2024).

Guna memaksimalkan dampak positif peningkatan PDRB terhadap upaya perbaikan kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Banten dengan menurunnya jumlah pengangguran, pemerintah harus memperluas akses pendidikan kejuruan sekaligus meningkatkan kualitasnya agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, penting untuk menyelaraskan program pelatihan kerja dengan permintaan industri yang dinamis. Dalam upaya ini, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, serta institusi pendidikan memegang peranan penting guna membangun tatanan ekonomi yang melibatkan semua kalangan, kompetitif, dan berkelanjutan (Rahma, 2023). Maka dari itu, penelitian di daerah ini sangat diperlukan untuk mengungkap berbagai faktor yang memicu meningkatnya pengangguran. Aspek seperti tingkat pendidikan, kebijakan upah minimum, serta perlambatan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diduga turut memperburuk kondisi tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian dapat memberikan rekomendasi strategi yang sesuai untuk menanggulangi permasalahan pengangguran.

Penelitian ini menjadikan Provinsi Banten sebagai objek kajian karena tingkat pengangguran terbuka yang relatif tinggi serta keragaman struktur ekonominya, sehingga relevan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhinya. Variabel dependen yang digunakan adalah tingkat

pengangguran terbuka, sedangkan variabel independennya meliputi tingkat pendidikan (rata-rata lama sekolah), upah minimum provinsi (UMP), dan pertumbuhan PDRB harga konstan. Pemilihan variabel tersebut didasarkan pada landasan teoritis dan empiris, di mana pendidikan mencerminkan kualitas tenaga kerja, UMP merepresentasikan kebijakan ketenagakerjaan, dan PDRB menggambarkan kondisi pertumbuhan ekonomi daerah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menggunakan wilayah, kombinasi variabel, dan periode data yang berbeda, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan ketiga variabel tersebut terhadap pengangguran di Provinsi Banten.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian latar belakang serta pembahasan sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap TPT?
2. Apakah Upah Minimum berpengaruh terhadap TPT?
3. Apakah laju pertumbuhan PDRB berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan uraian rumusan masalah yang telah dipaparkan, sehingga maksud dari penelitian ini bisa dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengkaji bagaimana tingkat pendidikan memengaruhi jumlah pengangguran di Provinsi Banten.
2. Mengkaji sejauh mana UMP berkontribusi pada perubahan tingkat pengangguran di Provinsi Banten.
3. Mengkaji bagaimana peningkatan PDRB memengaruhi tingkat pengangguran di Provinsi Banten.

1.4 Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi analisis terhadap berbagai aspek yang mempunyai peran dalam tingginya tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Fokus utama diarahkan pada isu ketimpangan antara kompetensi tenaga kerja serta kebutuhan industri, kebijakan terkait upah minimum, serta peran tingkat pendidikan dalam memengaruhi angka pengangguran. Data penelitian didapat dari BPS juga beragam referensi literatur lainnya.

1.5 Manfaat Penelitian

Guna mendapatkan hasil yang bisa bermanfaat untuk menambah wawasan dalam mengungkapkan permasalahan mengenai tingginya tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Sehingga *output* penelitian ini berguna, khususnya bagi:

1. Bagi Pemerintah, Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai landasan dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat guna menanggulangi pengangguran, antara lain melalui pengembangan pendidikan vokasi serta program pelatihan kerja yang selaras dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

2. Bagi Akademisi, diharapkan dapat menyumbang pada kemajuan teori juga praktik yang relevan dengan isu pengangguran di negara berkembang, sehingga dapat memperkaya literatur ilmiah.
3. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memperluas pemahaman terhadap peran penting pendidikan dan keterampilan sebagai bekal utama untuk memasuki pasar kerja yang kian kompetitif.
4. Bagi Sektor Swasta, penelitian ini menawarkan pemahaman tentang kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan seiring perubahan industri, serta mendorong terjalinnya kerjasama yang lebih efektif dengan pemerintah dan institusi pendidikan.